

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)

Oleh

ANGELICA SHEREN MAHARANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum bagi anak terlantar melalui penetapan perwalian. Dalam kerangka perlindungan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki kewajiban memastikan terpenuhinya aspek hukum bagi anak asuh, namun implementasinya di Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di LKSA Yayasan Bussaina serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur bahwa badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak melalui penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, Yayasan Bussaina telah mengajukan permohonan penetapan perwalian bagi sepuluh anak pada tahun 2024 melalui prosedur persiapan dokumen, pengajuan *e-court*, persidangan, hingga penetapan pengadilan. Namun, dari 93 LKSA di Bandar Lampung, hanya satu yang aktif mengajukan permohonan penetapan perwalian. Faktor pendorong meliputi tuntutan sistem digital, kepemimpinan proaktif, kolaborasi dengan Kejaksaan, dan kesadaran hukum internal. Sementara itu, faktor penghambat mencakup kompleksitas prosedur, minimnya dukungan pemerintah, keterbatasan kapasitas, dan kurangnya sosialisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih sistematis.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Terlantar, LKSA, Perlindungan Anak, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GUARDIANSHIP DETERMINATION FOR ABANDONED CHILDREN BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (Study at LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung)

By

ANGELICA SHEREN MAHARANI

This study is motivated by the importance of legal certainty for neglected children through guardianship determination. In the framework of child protection, Child Social Welfare Institutions (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) are responsible for ensuring the fulfillment of legal aspects for children under their care; however, its implementation in Bandar Lampung still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of guardianship determination for neglected children at LKSA Yayasan Bussaina and to identify its supporting and inhibiting factors.

This research employed an empirical normative legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with Yayasan Bussaina and judges of the Tanjung Karang District Court, as well as through the study of laws and regulations, books, and journals. The data were analyzed qualitatively.

The results show that Article 33 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in conjunction with Government Regulation Number 29 of 2019 stipulates that qualified legal entities may be appointed as guardians through court determination. In practice, Yayasan Bussaina submitted guardianship determination applications for ten children in 2024 through document preparation, e-court submission, court hearings, and court determination. However, among 93 LKSAs in Bandar Lampung, only one actively submitted such applications. Supporting factors include digital system demands, proactive leadership, collaboration with the Prosecutor's Office, and legal awareness, while inhibiting factors include procedural complexity, limited government support, limited capacity, and lack of socialization. These conditions indicate the need for more systematic policy intervention.

Keywords: Guardianship, Abandoned Children, LKSA, Child Protection, Court Determination